

**BENTUK KERJASAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA PROVINSI NTB DENGAN
ZHEJIANG TIONGKOK 2018-2023**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Strata-1*

SKRIPSI



Oleh:

REYDO ADJI SAPRIYATNA

NIM.201910360311088

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Bentuk Kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB Dengan Zhejiang Tiongkok 2018-2023

Diajukan Oleh :

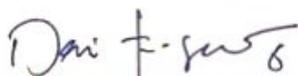
Reydo Adji Sapriyatna

201910360311088

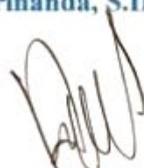
Telah disetujui

Pada hari / tanggal, Kamis / 13 Juli 2023

Pembimbing I


Dedik Fitra Suharmanto, M. Hub.Int.

Pembimbing II


Devita Prinanda, S.IP., M.Hub.Int


Dekan I
Najmuddin Husein Rijal, M.Hub.Int.


Ketua Program Studi
Hubungan Internasional
Dr. Dyah Estu Kurniawati, M. SI.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

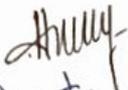
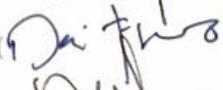
Dipersiapkan dan disusun oleh :

Reydo Adji Sapriyatna
201910360311088

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Rabu, 31 Mei 2023
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si.** ()
2. **Hamdan Nafiatur Rosyida, M.Si.** ()
3. **Dedik Fitra Suharmanto, S.IP., M. Hub.Int.** ()
4. **Devita Prinanda, S.IP., M.Hub.Int** ()

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Nuzumuddin Khar Rijal, M.Hub.Int.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reydo Adji Sapriyatna
NIM : 201910360311088
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Bentuk kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB Dengan
Zhejiang Tiongkok 2018-2023

Pembimbing : 1. Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int.
2. Devita Prinanda, M.Hub. Int.

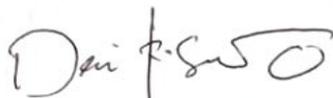
Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
11 April 2023			Pengajuan Judul
13 April 2023			Revisi Penelitian Terdahulu
15 April 2023			Revisi Pembahasan
17 April 2023			Revisi Penulisan
14 Mei 2023			Revisi penambahan data
16 Mei 2023			ACC Draft Akhir

Malang, 16 Mei 2023

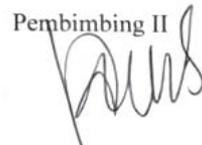
Menyetujui,

Pembimbing I



Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int.

Pembimbing II



Devita Prinanda, M.Hub. Int.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reydo Adji Sapriyatna
NIM : 201910360311088
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Bentuk Kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB dengan
Zhejiang Tiongkok 2018-2023
Pembimbing : Dedik Fitra Suhermanto, S.IP., M. Hub. Int.

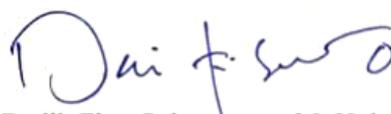
Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf	Keterangan
	Pembimbing Pembimbing I	
13 Mei 2023		dinyatakan sidang
29 Mei 2023		Meminta persetujuan sidang ulang
30 Mei 2023		Mengumpulkan revisi naskah TA
31 Mei 2023		Melaksanakan persentasi sidang

Malang, 13 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing



Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int.

SURAT PERNYATAAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reydo Adji Sapriyatna
NIM : 201910360311088
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul:
2. Implementasi kerjasama sister province antara provinsi NTB dengan Zhejiang tiongkok dalam bidang pembangunan infrastruktur lokal adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Juli 2023
Yang Menyatakan,


Reydo Adji Sapriyatna

ABSTRAK

BENTUK KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI NTB DENGAN ZHEJIANG TIONGKOK 2018-2023

Reydo Adji Sapriyatna
201910360311088

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: reydoadjisapriyatna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama sister province antara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Indonesia dan Provinsi Zhejiang di Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2023. Kerjasama sister provinsi merupakan bentuk hubungan bilateral yang mengutamakan pertukaran budaya, ekonomi, akademik dan pertukaran informasi antara dua provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan kerjasama sister province NTB dengan Zhejiang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama sister province NTB dengan Zhejiang telah memberikan dampak positif dalam berbagai sektor, yaitu bidang ekonomi, budaya, akademik dan pertukaran informasi antara kedua wilayah. Kerjasama dalam sektor pariwisata juga mengalami perkembangan signifikan, dengan peningkatan kunjungan wisatawan dari Zhejiang ke NTB dan sebaliknya. Selain itu, kerjasama budaya dan pendidikan antara NTB dan Zhejiang juga semakin erat. Pertukaran pelajar, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya menjadi bagian penting dari kerjasama ini. Hal ini membantu memperkaya pemahaman antara kedua masyarakat dan meningkatkan hubungan bilateral secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerjasama sister province antara NTB dan Zhejiang dari tahun 2018 hingga 2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih kokoh dan saling menguntungkan antara kedua provinsi ini di masa depan.

Keywords: Kerjasama; Nusa Tenggara Barat; Pemerintah daerah; Sister Province; Zhejiang.

Malang, 10 Juli 2023

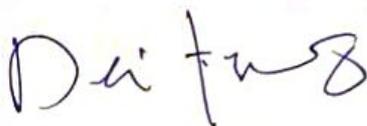
Peneliti



Reydo Adji Sapriyatna

Menyetujui,

Pembimbing I



Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int.

Pembimbing II



Devita Prinandia, M. Hub. Int.

ABSTRACT

BENTUK KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI NTB DENGAN ZHEJIANG TIONGKOK 2018-2023

Reydo Adji Sapriyatna

201910360311088

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: reydoadjisapriyatna@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze sister province cooperation between West Nusa Tenggara Province (NTB) in Indonesia and Zhejiang Province in China from 2018 to 2023. Sister province cooperation is a form of bilateral relationship that prioritizes cultural, economic, academic exchanges and exchange of information between the two provinces. . This study uses a qualitative descriptive approach to describe and analyze the development of cooperation between the sister province of NTB and Zhejiang. Data is collected through literature study, analysis of official documents. The results of the study show that the cooperation of the sister province of NTB with Zhejiang has had a positive impact on various sectors, namely the economic, cultural, academic and exchange of information between the two regions. Cooperation in the tourism sector has also experienced significant development, with an increase in tourist visits from Zhejiang to NTB and vice versa. In addition, cultural and educational cooperation between NTB and Zhejiang is getting closer. Student exchanges, art performances, and other cultural activities are an important part of this collaboration. This helped enrich the understanding between the two peoples and enhance the bilateral relationship as a whole. This research provides a better understanding of the sister province cooperation between NTB and Zhejiang from 2018 to 2023. It is hoped that the results of this research can serve as a basis for enhancing stronger and mutually beneficial bilateral cooperation between these two provinces in the future.

Keywords: Cooperation, Nusa Tenggara Barat, Local government, Sister Province, Zhejiang .

Malang, 10 Juli 2023

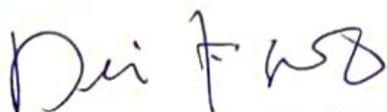
Peneliti



Reydo Adji Sapriyatna

Menyetujui,

Pembimbing I



Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int.

Pembimbing II



Devita Prinandia, M. Hub. Int.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Bentuk Kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB Dengan Zhejiang Tiongkok 2018-2023”** yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) strata-1 Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan saya cintai, yakni Ayahanda Muhammad safi'i dan juga Ibunda Sujenah yang selalu melimpahkan kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak pernah berhenti demi kelancaran dan kesuksesan penulis, seluruh keluarga tercinta.
2. Ibu Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.int selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan, kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Dosen Jurusan Hubungan Internasional yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff/dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan pengajaran terbaik serta pengalaman yang tidak didapatkan di tempat lain selama kurang lebih 4 tahun ini dengan harapan nantinya ilmu tersebut akan bermanfaat untuk penulis di hari yang akan datang.
6. Seluruh kawan-kawan perjuangan selama kuliah yang selama ini sudah saling membantu dalam memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Serta tidak lupa saya ucapkan terimakasih sepenuh hati kepada pasangan saya, fayrus muhammad yang sudah menemani saya selama mengerjakan tugas akhir ini. Dengan seluruh hati saya yang paling dalam, saya ingin berterimakasih karena telah memberi dukungan sepenuhnya.

8. Dan yang terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri saya yang sudah sampai titik akhir ini. Banyak cobaan yang saya lewati selama mengerjakan tugas akhir ini, untuk itu saya ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penelitian ini yang perlu diperbaiki agar penelitian ini lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak dalam program studi hubungan internasional.

Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh

Malang, 13 Juni 2024



Reydo Adji Sapriyatna



MOTTO

“Move with Passion, Succeed with Action.”



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
LEMBAR PLAGIASI	xii
ABSTRAK	1
LATAR BELAKANG MASALAH	2
TEORI DAN KONSEP	10
Paradiplomasi.....	10
<i>Sister Province</i>	11
METODOLOGI	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
Hubungan Indonesia-Tiongkok Dalam Inisiasi Kerjasama Provinsi NTB dan Zhejiang	14
Program Kerja Sama Antara Provinsi NTB dan Zhejiang.....	16
Analisis Potensi Kerjasama <i>Sister Province</i> Antara Provinsi NTB dan Zhejiang Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Lokal.....	19
KESIMPULAN	20
DAFTAR PUSTAKA	22

LEMBAR PLAGIASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.6.e/193/Hi/FISIP-UMM/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Reydo Adji Sapriyatna
NIM : 201910360311088
Judul Skripsi : Bentuk Kerjasama *Sister Province* Antara Provinsi NTB Dengan Zhejiang Tiongkok 2018-2023
Dosen Pembimbing : 1. Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub.Int.
2. Devita Prinanda, M. Hub. Int.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	5%

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 25 Oktober 2023

Ka. Prodi Hubungan Internasional,



Dr. Diah Estu Kurniawati, M.Si



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 351 211 (Hunting)
F: +62 341 400 431

Kampus II
Jl. Bendungan Suren No 180 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 351 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No 240 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 364 310 (Hunting)
F: +62 341 892 475

BENTUK KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI NTB DENGAN ZHEJIANG TIONGKOK 2018-2023

¹Reydo Adji Sapriyatna, ² Dedik Fitra Suhermanto, ³ Devita Prinanda

Program Studi Hubungan Internasional

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: reydoadjisapriyatna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalinan kerjasama sister province oleh Nusa Tenggara Barat (NTB) di Indonesia dengan mitranya yaitu Zhejiang di Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2023. Kerjasama sister provinsi merupakan bentuk hubungan bilateral yang mengutamakan pertukaran budaya, ekonomi, akademik dan pertukaran informasi antara dua provinsi. Penggunaan teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan kerjasama sister province NTB dengan Zhejiang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama sister province NTB dengan Zhejiang telah memberikan dampak positif dalam berbagai sektor, yaitu bidang ekonomi, budaya, akademik dan pertukaran informasi antara kedua wilayah. Kerjasama dalam sektor pariwisata juga mengalami perkembangan signifikan, dengan peningkatan kunjungan wisatawan dari Zhejiang ke NTB dan sebaliknya. Selain itu, kerjasama budaya dan pendidikan antara NTB dan Zhejiang juga semakin erat. Pertukaran pelajar, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya lainnya menjadi bagian penting dari kerjasama ini. Hal ini membantu memperkaya pemahaman antara kedua masyarakat dan meningkatkan hubungan bilateral secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan kerjasama sister province antara NTB dan Zhejiang dari tahun 2018 hingga 2023. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih kokoh dan saling menguntungkan antara kedua provinsi di masa depan.

Kata Kunci: Kerjasama, Nusa Tenggara Barat, Pemerintah daerah, Sister Province, Zhejiang.

LATAR BELAKANG MASALAH

Nusa Tenggara Barat (NTB) banyak di kenal oleh banyak orang sebagai daerah yang menyimpan banyak keanekaragaman mulai dari kebudayaan hingga keindahan alamnya. Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari provinsi ini bahkan termasuk dalam destinasi pariwisata yang menjadi magnet utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti halnya pulau Lombok. Namun, jauh sebelum itu, ternyata pembentukan provinsi ini tidak melalui proses yang pendek, melainkan melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, NTB merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur yang berada dibawah payung pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) kemudian seiring dengan berjalannya waktu, daerah tersebut masuk terintegrasi ke dalam Provinsi Sunda Kecil. Selanjutnya, NTB berhasil mendapatkan status sebagai provinsi pada tanggal 17 Desember 1958 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Wilayah NTB sendiri terdiri atas dua pulau utama yaitu Lombok dan Sumbawa serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun pusat pemerintahan Provinsi NTB berkedudukan dan beribukota di Mataram, Pulau Lombok (Provinsi NTB _ Profile, n.d.).

Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah yang didalamnya terdapat berbagai keanekaragaman, hal tersebut dapat dijadikan sebagai keuntungan bagi NTB, entah itu dari segi ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi maka suatu kerjasama diperlukan. Dimana, dengan adanya kerjasama itu, maka NTB dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan mulai dari segi berbagai sektor tersebut yang otomatis mengangkat nama NTB dan tentunya ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kerjasama sendiri dapat dilakukan bersama dengan pemerintahan antar daerah maupun perusahaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Adapun salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh provinsi NTB yaitu melalui konsep paradiplomasi dengan pemerintah daerah yang setingkat di negara lain. Seperti yang diketahui, paradiplomasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi sub-negara atau *sub-state institutions* dengan cara berdiplomasi dengan mitra internasionalnya dengan aspirasi dan juga sarana prasarana yang cukup terbatas dan juga cenderung fokus terhadap keuntungan budaya, ekonomi, akademik, dan pertukaran informasi masyarakat yang diwakili oleh pemerintah daerahnya (Adam Grydehoj, 2015). Definisi dari paradiplomasi sendiri memiliki dasar pada pernyataan Daniel Bell dimana Bell mengatakan bahwa aktor non negara terlalu banyak menyelesaikan permasalahan atau hal-hal kecil lainnya dan di waktu yang bersamaan, aktor negara merasa mereka terlalu kecil untuk menyelesaikan permasalahan atau hal-hal yang lebih besar

dibandingkan dengan mereka (Bell, 1989). Oleh karena itu, negara tidak lagi menjadi aktor yang berperan tunggal dalam menjalankan kerjasama internasionalnya, melainkan saat ini aktor-aktor sub negara lah yang mulai memainkan perannya di bidang ini, demi tercapainya kepentingan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain karena wujud realisasi otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, paradiplomasi juga merupakan sarana yang memudahkan pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat dari sektor-sektor tersebut tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, karena mau bagaimanapun, hanya pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui segala kondisi daerahnya ketimbang pemerintah pusat (Mardialina & Munir, 2019).

Kerjasama *sister province* NTB dengan Zhejiang diawali dengan diterapkannya kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Indonesia dalam meningkatkan kerjasamanya dengan berbagai daerah. Kerjasama antar daerah di kedua negara tersebut mulai terjalin sejak tahun 2014, yaitu pada saat kedua pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama melalui skema *sister province* antara NTB dengan Zhejiang. Sebelumnya, Zhejiang telah menyepakati MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pemerintah provinsi Jawa Timur bahkan telah merencanakan bidang kerjasama yang terjalin dimulai pada tahun 2012 dalam bidang pertanian dan perikanan. Sehingga kerjasama mereka dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduknya agar dapat mencapai USD 15.000 (Sibbawahi, 2016). Dari hal tersebut kemudian membuat pemerintah provinsi Jawa Timur mengirimkan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) ke provinsi Zhejiang secara berkala dalam periode tertentu untuk mempelajari keberhasilan provinsi Zhejiang. Maka dari itu provinsi NTB tidak ketinggalan untuk bermitra dengan provinsi Zhejiang yang bertujuan untuk meningkatkan level hubungan kedua daerah hingga dapat menghasilkan keuntungan dalam berbagai bidang.

Sebagai daerah yang didalamnya terdapat berbagai keanekaragaman, hal tersebut dapat dijadikan sebagai keuntungan bagi NTB, entah itu dari segi ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi maka suatu kerjasama diperlukan. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama itu, maka NTB dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan mulai dari segi ekonomi, kebudayaan, akademik dan pertukaran informasi yang otomatis mengangkat nama NTB dan tentunya ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kerjasama sendiri dapat dilakukan bersama dengan pemerintahan antar daerah maupun perusahaan, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang tengah dijewantahkan oleh provinsi NTB yaitu melalui konsep paradiplomasi dengan pemerintah daerah setingkat di negara lain, dalam hal ini provinsi atau negara bagian di negara sahabat dengan Indonesia. Seperti yang diketahui, paradiplomasi

tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi sub-negara atau *sub-state* dengan cara berdiplomasi dengan mitra internasionalnya dengan aspirasi dan juga sarana prasarana yang cukup terbatas dan juga cenderung fokus terhadap keuntungan budaya, ekonomi, akademik dan petukaran informasi sehingga masyarakat yang diwakili oleh pemerintah daerahnya (Adam Grydehoj, 2015). Definisi dari paradiplomasi itu sendiri memiliki dasar terhadap Daniel Bell yang mana ia mengatakan bahwa aktor non negara sudah terlalu banyak menyelesaikan permasalahan atau hal-hal kecil lainnya dan pada saat yang sama, negara merasa mereka terlalu kecil untuk menyelesaikan permasalahan atau hal-hal yang lebih besar dibandingkan dengan mereka (Bell, 1989). dan oleh karenanya, negara tidak lagi menjadi aktor yang berperan tunggal dalam menjalankan kerjasama internasionalnya, melainkan saat ini aktor-aktor sub negara lah yang mulai memainkan perannya di bidang ini, demi tercapainya kepentingan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain karena wujud pengejawantahan otonomi daerah oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, paradiplomasi juga merupakan sarana yang memudahkan pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat dari perekonomian, kebudayaan, akademik dan pertukaran informasi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, karena mau bagaimanapun, hanya pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui segala kondisi daerahnya ketimbang pemerintah pusat (Mardialina & Munir, 2019).

Adapun untuk melaksanakan kerjasama melalui skema paradiplomasi ini, pemerintah daerah wajib untuk mengetahui landasan hukum tentang pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional (Effendi, 2000) dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan mitra internasional (UU RI, 2004). Paradiplomasi sendiri dalam pelaksanaannya, dapat terdiri atas kerjasama ekonomi, budaya, dan pendidikan, bahkan juga pendirian nota kesepahaman (*Memorandum of Outstanding/MOU*) (Takdir Ali Mukti, 2015). Paradiplomasi sendiri merupakan suatu aktivitas dalam yang dilakukan oleh aktor sub-negara (pemerintah daerah) di dalam hubungan internasional dengan aktor aktor sub-negara lain atau bahkan aktor non-negara. Pemerintah daerah dapat melakukan aktivitas paradiplomasi untuk memenuhi kepentingan wilayahnya terlepas dari kepentingan negara. Implementasi praktik tersebut dapat berupa kerjasama dalam sektor ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi. Zhejiang merupakan salah satu provinsi di bawah pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang secara geografis di bagian timur RRT dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Hangzhou yang terletak pada pesisir timur provinsi Zhejiang. Secara keseluruhan, luas dari

provinsi Zhejiang adalah 101,800 km² dengan jumlah penduduk Zhejiang yaitu berkisar diangka 46,800,000 jiwa. Terkait dengan profesi masyarakat provinsi tersebut, mayoritas berkarir di sektor pertanian dan perikanan dengan berprofesi menjadi petani, tukang kebun, dan nelayan. Zhejiang adalah wilayah yang menjadi provinsi percontohan produksi lokal kelautan dan salah satu pusat perdagangan oleh pemerintah RRT.

Tiongkok merupakan salah satu kekuatan utama dunia (*super power*) yang mana salah satu faktor tersebut yaitu tingginya pertumbuhan ekonomi dan pengaruh lobi politik pada tingkat internasional. Negara tersebut dapat dikatakan memiliki batu loncatan besar karena bertransformasi dari sebelumnya menerapkan isolasi atau menutup diri yang kemudian beralih menuju keterbukaan diri sebagai peningkatan pertumbuhan perekonomian. Transformasi itulah yang membuat Tiongkok menjelma menjadi salah satu *super power* ekonomi yang diperhitungkan di kancah internasional. (Sibbawaihi, 2016). Pemerintah telah memulai berbagai perubahan yang dimulai dari kancah domestik hingga perubahan yang melibatkan rezim internasional. Yang mana dalam hal tersebut, negara tersebut menjalin hubungan baik dengan berbagai negara dan organisasi internasional tidak terkecuali dengan negara di kawasan Asia Tenggara sebagai bentuk terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi salah satu faktor utama politik luar negeri Tiongkok sebagai percontohan atau inspirasi dalam pengembangan kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Zhejiang merupakan salah satu provinsi yang memiliki pendapatan perkapita terbesar di RRT, maka dari itu dibandingkan raihan PDB (Produk Domestik Bruto) saat itu yang berkisar nilai di atas USD 3,000.00 pada tahun 2011, berbanding dengan saat ini PDB yang diraih telah menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai lebih dari USD 400 Milyar, yang artinya mendekati sekitar 70% dari raihan total PDB nasional Indonesia. Adapun PDB perkapita penduduk Zhejiang merupakan salah satu raihan tertinggi di Tiongkok. PDB per kapita Indonesia secara nasional pada tahun 2014 berkisar pada angka Rp. 41.81 juta atau sekitar USD 3,531.45. Apabila dibandingkan dengan angka yang diraih NTB, PDB per kapitanya pada tahun 2014 kurang lebih Rp. 17.27 juta atau setara dengan USD 1,439.00. Maka dari itu tingginya pertumbuhan ekonomi secara tingkat provinsi di Tiongkok yang melatarbelakangi Tiongkok berani menanamkan modal investasi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (Sibbawaihi, 2016)

Kerjasama *sister province* antara NTB di Indonesia dengan Zhejiang di Tiongkok sejak tahun 2018 telah memberikan berbagai peluang dan manfaat dalam bidang ekonomi,

budaya, akademik, dan pertukaran informasi antara kedua wilayah tersebut. Dalam bidang ekonomi, kerjasama ini memberikan peluang bagi NTB dan Zhejiang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. (Nurmazinda, 2023) Melalui kerjasama ini, terjadi peningkatan pertukaran barang dan jasa antara kedua wilayah, yang diharapkan mampu menarik pertumbuhan ekonomi kemudian berlanjut membuka lapangan pekerjaan. Berbagai perusahaan dari NTB maupun Zhejiang dapat menjalin kemitraan strategis dalam berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan. Misalnya, pelaku usaha dari NTB dapat mengakses pasar yang lebih luas di Zhejiang, sementara perusahaan-perusahaan Zhejiang dapat memanfaatkan sumber daya alam NTB dan mengembangkan investasi mereka di wilayah tersebut.

Di bidang budaya, kerjasama *sister province* memungkinkan pertukaran seni, pertunjukan budaya, dan pameran antara NTB dan Zhejiang. Hal ini dapat memperkaya pemahaman budaya antara kedua masyarakat, mempromosikan warisan budaya masing-masing wilayah, dan memperkuat hubungan antara seniman, pelaku budaya, dan lembaga budaya di NTB dan Zhejiang sehingga terjalinnya pemahaman tentang latar belakang budaya yang melibatkan unsur-unsur kesenian di sektor musik, pertunjukan budaya tradisional dan hal lain yang terkait dengan budaya. Contohnya, seniman dan pelaku budaya dari NTB dapat berpartisipasi dalam festival seni di Zhejiang, sementara seniman Zhejiang dapat tampil di acara seni di NTB. (Nurmazinda, 2023) Pertukaran ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya, tetapi juga menciptakan kesempatan kolaborasi dan pengembangan industri kreatif di kedua wilayah.

Dalam bidang akademik, kerjasama *sister provinsi* membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pengembangan akademik antara NTB dan Zhejiang yang biasanya melibatkan delegasi-delegasi dari suatu kota atau provinsi untuk di tunjuk untuk mempromosikan budayanya masing-masing dan mempelajari budaya lain sebagai bentuk mempererat hubungan kedua belah pihak dan juga Perguruan tinggi dan institusi pendidikan di kedua wilayah dapat menjalin kemitraan dan mengadakan program pertukaran pelajar serta staf pengajar. (Nurmazinda, 2023) Hal ini dapat memperluas wawasan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan teknologi antara Provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang.

Pertukaran informasi juga menjadi bagian penting dari kerjasama *sister provinsi* antara NTB dan Zhejiang. Melalui kerjasama ini, kedua wilayah dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dapat menanggulangi permasalahan yang di hadapi dari kedua belah pihak terkait pembangunan ekonomi, pariwisata, budaya, dan sektor-sektor lainnya.

(Nurmazinda, 2023) Pertukaran informasi yang intensif dapat membantu mengoptimalkan peluang bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat perkembangan di kedua wilayah.

Kerjasama sister provinsi antara NTB dan Zhejiang dalam bidang ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi memiliki potensi besar untuk menciptakan sinergi dan saling menguntungkan. Melalui kerjasama yang erat, kedua wilayah dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan antar provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang sehingga dalam peluang kerjasama internasional ini di harapkan untuk kedepannya dapat terus terjalin dan dapat saling menguntungkan antar provinsi. Maka penelitian ini adalah bentuk dari penelitian berkelanjutan dari artikel yang di tulis oleh 2023, Riri Nurmazinda yang berjudul *KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI NTB DAN PROVINSI ZHEJIANG (RRT) DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH (2014-2018)* . (Nurmazinda, 2023)

Adapun untuk mendukung penulisan ini, maka di butuhkan sebuah ulasan terhadap literatur bacaan atau yang bisa disebut sebagai literature review. Dimana, penulisan ini merujuk kepada jurnal dan skripsi yaitu:

Pertama jurnal yang berjudul, "*PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG MELALUI KERJASAMA SISTER CITY*" yang di tulis oleh Gilang Nur Alam dan Arifin Sudirman. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana jalannya praktik paradiplomasi di kota bandung melalui skema sister city atau kota kembar, dengan memaparkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu juga jurnal tersebut mengupas tuntas mengenai upaya yang di lakukan Kota Bandung untuk memenuhi aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan dengan cara menjalin kerjasama internasional melalui aspek paradiplomasi. Hingga kronologi watu kerjasama paradiplomasi dengan pemerintah kota di luar negeri.

Kedua yaitu jurnal berjudul, "*KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER CITY*" yang di tulis oleh Henike Priwantai, Windy Dermawan, dan Widya Ardianty. Dimana, kerjasama provinsi Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota beijing yang berfokus di berbagai bidang dan saling bertukar pengalaman yaitu bidang pendidikan, pemerintah Beijing mendapatkan kesempatan dalam berbagai pengalaman dari program-program yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan Beijing, kerjasama yang di lakukan oleh kedua belah pihak negara memerikan kesempatan untuk mempromosikan udaya masing-masing kota. Akan tetapi, kerjasama ini masih kurang efektif hal ini masih selalu ada dalam kerjasama *sister city* atau *sister province*.

Ketiga, jurnal yang berjudul "*PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV*

NTB MEMBANGUN KERJASAMA SISTER PROVINSI DENGAN PEMPROV ZHEJIANG RRT 2014-2015” yang di tulis oleh Assazali Sibawaihi. Dimana, jurnal ini membahas mengenai proses terjalinnya suatu kerjasama antar provinsi atau lebih di kenal dengan sister province yang di putuskan oleh pejabat daerah. tidak ada ketentuan tertentu untuk dapat menjalin kerjasama yang bertujuan untuk dapat saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Akan tetapi kerjasama tersebut tidak sesuai dengan harapan yang mana kerjasama dalam skema *sister province* antara kedua belah pihak yaitu NTB dan Zhejiang, dapat di manfaatkan sebaik-baiknya akan tetapi pemerintah provinsi NTB tidak manfaatkan dengan baik.

Keempat, jurnal yang berjudul, “KETERLIBATAN DESA SUMBERMULYO DALAM KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTAR D.I. YOGYAKARTA DENGAN GYEONGSANGBUK-DO” yang di tulis oleh Sanny Pestari¹, Rivelda Pricilia Heatbun², Rezki Nur Fajri³. Dimana, fokus pembahasannya adalah pembangunan desa sumbermulyo dalam hal meningkatkan dana membantu pertanian serta pembangunan infrastruktur desa, kerjasama tersebut bisa di katakan berhasil yang dapat memberikan keuntungan secara maksimal. tetapi adanya sedikit hambatan dalam bidang administrasi yang tidak sesuai namu hal tersebut dapat di selesaikan dengan adanya pihak ketiga sebagai penghubung untuk kerjasama.

Kelima, jurnal yang berjudul PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI BALI UNTUK SISTER PROVINCIAL BALI HO CHI MINH DI BIDANG PARIWISATA yang di tulis oleh Dhita Kusuma Wardani. Dimana, kerjasama tersebut sama-sama memiliki tujuan dalam meningkatkan kerjasama bilateral yang menjadi mitra strategis dalam bidang pariwisata sebagai suatu sektor yang di fokuskannya. Karena sektor pariwisata yang paling cocok untuk di andalkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Maka dari itu pemerintah bali dan vietnam sepakat untuk saling bekerjasama dan melakukan berbagai kegiatan seagai bentuk promosi di bidang pariwisata. Akan tetapi sangat di sayangkan kerjasama ini tidak ada kelanjutan hingga saat ini.

Keenam, yaitu jurnal yang berjudul IMPLEMENTASI SISTER PROVINCE JAWA TENGAH DENGAN NEGARA BAGIAN QUEENSLAND AUSTRALIA Di BIDANG PERTANIAN yang di tulis oleh Reni Windiani. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi kerjasama kedua belah pihak dalam hal mewujudkan kepentingan kedua belah pihak di bidang pertanian. Jurnal ini diawali dengan pendahuluan yang memberikan pernyataan dan opini mengenai globalisasi, kemudian landasan hukum pelaksanaan paradiplomasi, hingga kebijakan yang di anut oleh kedua belah pihak dalam hal

pertanian di masing-masing wilayah. Dalam jurnal tersebut, terdapat juga table yang berisi kota di Indonesia yang menjalin kerjasama sister city atau province.

Ketujuh, skripsi yang berjudul, IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DENGAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB) yang di tulis oleh Azry Almi Kaloko. Dimana, skripsi tersebut membahas tentang bagaimana implementasi kerjasama dalam bidang infrastruktur kepada Indonesia dengan AIIB. Yang di mana kerjasama pembangunan infrastruktur Indonesia bersama dengan AIIB dapat membawa Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya AIIB untuk meraih pendanaan dalam pembangunan infrastruktur sehingga hal ini dapat mempercepat proses pembangunan nasional Indonesia.

Kedelapan, jurnal yang berjudul, IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY KOTA DENPASAR DENGAN KOTA MOSSEL BAY DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF BERKELANJUTAN yang di tulis oleh Luh Gede Atrina Rahma Savitri. Dimana, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kerjasama sister city Kota Denpasar dengan Kota Mossel Bay hingga faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan ekonomi kreatif berkelanjutan. Berjalannya kerjasama tersebut dalam jangka dua tahun dapat dikatakan cukup berhasil berdasarkan indikator yang di gunakan, akan tetapi adanya faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan waktu, persaingan harga pasar, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang menyebabkan kerugian dari kedua belah pihak. Akan tetapi kedua belah pihak langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan Plans Of Action sehingga secara perlahan kerjasama tersebut perlahan membaik sehingga mencapai target dan tujuan kerja sama.

Kesembilan, skripsi yang berjudul, ANALISA PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI YOGYAKARTA DENGAN PREFEKTUR KYOTO yang di tulis oleh Chanidia Ari Rahmayani. Penelitian skripsi tersebut membahas mengenai empat faktor yang menjadi acuan dalam kegiatan paradiplomasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto di Jepang. Selain itu di jelaskan pula bahwa terdapat adanya sengketa mengenai pelaksanaan paradiplomasi di kedua belah pihak, salah satunya yaitu karena ketidak jelasan jangka waktu pelaksanaan kerjasama tersebut, sehingga hal tersebut jelas membuat proses yang selama ini dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi sia-sia dan terkesan membuang waktu.

Kesepuluh, jurnal yang berjudul EFEKTIVITAS PROGRAM ITAC DALAM KERJASAMA SISTER PROVINCE PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN QUEENSLAND TAHUN 2019-2021 yang di tulis oleh Farah Dila Puspitasarie, Mohammad

Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian. Dimana, kerjasama provinsi Jawa Tengah dengan Queensland memiliki fokus dalam bidang pengembangan SDM yang di lakukan melalui bidang pendidikan. Di Jawa Tengah mengalami permasalahan dalam kualitas pendidikan karena di sana masih rendahnya kualifikasi yang di miliki oleh seorang guru. Akan tetapi kerjasama ini mengalami kendala karena tidak melibatkan peran masyarakat dalam merencanakan implementasi program dan manfaat dari adanya kerjasama ini hanya di dominasi oleh Provinsi Jawa Tengah.

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap hubungan luar negeri daerah oleh aktor non-negara, yaitu pemerintah provinsi NTB, yang kemudian memfokuskan bagaimana praktik pelaksanaan *sister province* di negara lain. Dimana hal tersebut dapat ditinjau melalui pendekatan paradiplomasi dengan memperhatikan landasan hukum yang berlaku. Penulisan ini juga dapat memiliki upaya untuk menjelaskan bagaimana provinsi NTB menjalankan paradiplomasi dengan mitra internasionalnya yaitu Zhejiang Tiongkok melalui bentuk *sister province* yang kemudian akan memunculkan pemahaman mengenai proses diplomasi sub-negara oleh pemerintahan suatu daerah dapat memberikan peran bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan yang saling menguntungkan.

Objek penelitian yang di fokuskan dalam sektor ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi. yang mana telah menjadi prioritas pemerintah NTB untuk dikembangkan dengan alasan keterbatasan biaya yang menjadikan kerjasama ini penting di sektor tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah pada penulisan ini yaitu: Bagaimana Bentuk Kerjasama Sister Province Pemerintah Provinsi NTB Dengan Zhejiang Tiongkok Dalam Sektor Ekonomi, Budaya, Akademik, dan Pertukaran Informasi hingga saat ini.

TEORI DAN KONSEP

Paradiplomasi

Paradiplomasi, seperti yang telah sedikit dijelaskan dalam bagian pendahuluan diatas, dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama internasional yang di lakukan oleh aktor sub-negara seperti pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan dari daerah tersebut tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah pusat. Menurut Kuznetsov (2014), paradiplomasi merupakan suatu tindakan komunikasi politik untuk menggapai keuntungan dari segi ekonomi, politik, budaya dan jenis yang lainnya yang mana tindakan tersebut di lakukan antara pemerintah daerah di suatu negara dengan kolega internasionalnya seperti sesama pemerintahan daerah atau aktor non-negara di luar dari kedaulatan negara tempat daerah tersebut (Adam Grydehoj, 2015). Sedangkan konsep paradiplomasi yang muncul pada

era seperti saat ini, muncul sebagai salah satu teori hubungan internasional yang mana, ini merupakan bagian dari perkembangan dari konsep diplomasi modern yang juga menimbulkan sehingga ini menarik untuk diteliti. Seperti yang di utarakan oleh Duchacek (1987) yang menyatakan bahwa paradiplomasi berarti suatu tindakan kerjasama internasional langsung yang di lakukan oleh aktor sub-negara seperti pemerintah kota, federal, hingga komunitas urban (Adam Grydehoj, 2015).

Dalam contoh, paradiplomasi telah berhasil diterapkan di berbagai negara dengan hasil yang signifikan. Di Kanada, provinsi Quebec telah menjalin hubungan ekonomi dan budaya dengan beberapa negara Eropa yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal (Lecours, 2002). Sementara itu, di Spanyol, wilayah Catalonia telah membentuk jaringan kerjasama internasional yang kuat, terutama dalam bidang budaya dan pendidikan, yang memperkuat identitas regional serta meningkatkan daya saing global (Aldecoa & Keating, 1999). Di Indonesia telah memberikan payung hukum yang tertuang dalam UUD 1945 dalam bentuk wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalin sebuah kerjasama internasional dengan tujuan agar dapat mengeksplorasi dan terus mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan supaya bisa bersaing di kancah internasional. Walaupun demikian, jalinan kerjasama yang dilakukan tidak lain juga untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Oleh karena itu, paradiplomasi ini merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan keeratn kerjasama internasional antara pemerintah daerah dengan mitra internasional yang dapat memberikan keuntungan masing masing.

Sister Province

Adapun *sister province* secara umum sebenarnya memiliki definisi yang sama dengan sister city yaitu suatu bentuk kerjasama yang dibentuk oleh kedua belah pihak di tingkat non negara dengan sifat baik itu jangka pendek maupun jangka panjang (Zelinsky, 1991). *Stakeholder* yang terlibat memandang bahwa kerjasama ini akan mendatangkan prospek keuntungan bagi mereka diantaranya mulai dari aspek ekonomi, bisnis, pendidikan, proyek bersama hingga budaya (SCI, 2020). Dengan kemajuan dunia yang semakin pesat serta kompleks, menjadikan pemenuhan kepentingan nasional semakin penting yang membuat hal tersebut menjadi bahan baku yang akan menentukan kekuatan nasional suatu negara.

Pada awal perkembangannya, *Sister City* maupun *Sister Province* digagas oleh terciptanya jalinan kerjasama di wilayah Eropa dan juga Amerika Serikat sejak periode 1950-an. Konsep awal munculnya *sister city* digagas oleh presiden Amerika Serikat yakni Dwight Eisenhower yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden ke-34 Amerika Serikat,

dalam suatu konferensi yang di gelar di Gedung Putih, kediaman resmi presiden Amerika Serikat pada tahun 1956. Ia pun menganggap bahwa konsep ini adalah konsep yang berprinsip *people to people* atau dari masyarakat untuk masyarakat pula, dan pada saat ini lebih dari 11,000 perjanjian dengan menggunakan konsep tersebut telah ditandatangani. Konsep kerjasama ini memiliki manfaat dari berbagai bidang yang dapat menguntungkan pihak yang terlibat (Sister City International, 2021) Adapun dalam sejarahnya, perjanjian *sister city* atau *province* tertua di dunia adalah perjanjian yang melibatkan antara pemerintah kota Toledo, Spanyol dengan Negara bagian Ohio, Amerika Serikat, yang di laksanakan pada tahun 1931, 25 tahun sebelum dicetuskan istilah *sister cities* oleh Presiden Eisenhower. Dan, fakta menariknya, Toledo juga merupakan nama salah satu wilayah di Ohio (Toledo Sister City, 2020). Konsep ini tidak lepas hubungannya dengan diplomasi dan peran masyarakat sebagai bagian dari aktor diplomasi tersebut. Maka pengertian dari *sister city* atau *sister province* ini merupakan agenda hubungan antar kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan motif bersama untuk bersama-sama saling mengembangkan daerahnya masing-masing. Ide ini awalnya diterapkan sebagai bentuk diplomasi politik negara pada berbagai tingkat yakni tingkat regional serta tingkat internasional yang bertujuan untuk mendorong rakyatnya untuk memperluas jaringan serta jalinan kerjasama serta persahabatan yang bersifat konstruktif di seluruh lapisan pemerintahan baik antar pemerintahan kota, provinsi serta pusat di seluruh dunia. Jalinan kerja sama ini pun memiliki banyak penyebutan seperti *Sister City*, *Sister Province*, *Friendship City*, *Twinning City*, juga *Partner Towns*. Akan tetapi di Indonesia sendiri telah disepakati secara resmi memakai *Sister City* atau *Sister Province* sebagai istilah dalam penyebutan skema kerjasama internasional berdasarkan surat edaran Mendagri No. 193/1652/POUD.

Pada penerapannya baik itu *sister city* maupun *sister province* tentunya memiliki tahapan tahapan yang harus dilalui, adapun tahapan proses hubungan kerjasama yang pertama adalah jalinan kerjasama yang dilakukan harus disahkan dengan perjanjian formal melalui penandatanganan MoU yang dilakukan oleh kedua pihak, yang mana pejabat Kota/Provinsi atau pihak yang bersangkutan. Tahap yang kedua yakni penentuan jangka waktu jalinan kerja sama harus dalam jangka waktu yang panjang atau tak terbatas (David, 2008). Yang ketiga yakni penyusunan perencanaan dan penyebarluasan rancangan kerjasama yang telah disusun. Yang keempat adalah peranan serta partisipasi, yakni pada kerjasama yang telah dijalin harus ada peran dari pemerintah serta partisipasi dari masyarakat terkait agar seluruh program kerjasama ini berhasil. Kelima kerjasama yang telah dijalin harus bersifat visioner dan mampu memberikan dampak positif yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta

memiliki prinsip perubahan yang berkemajuan. Adapun dalam menjalin kerjasama Sister City ataupun Sister Province harus didasarkan pada beberapa hal berikut yakni :

1. Memiliki kedudukan dan status administrasi yang setara
2. Memiliki kesamaan fungsi yang
3. Memiliki kesamaan karakteristik
4. Memiliki kesamaan kondisi dan permasalahan yang dihadapi
5. Memiliki teknologi serta ilmu yang dapat dipertukarkan
6. Memiliki prinsip komplementaris agar dapat terjadinya aliran pertukaran yang baik

Dalam hal ini provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang membangun kerjasama Sister Province bertujuan untuk terus mengeratkan jalinan persahabatan serta kerjasama dengan pemerintah Zhejiang Tiongkok juga tidak lain untuk kepentingan daerahnya yakni membangun masing masing daerah serta terbukanya jalan kerjasama internasional antara keduanya sebagai pintu gerbang dalam melakukan pertukaran ide, informasi, pengetahuan serta budaya. Jalinan kerjasama ini juga bertujuan untuk membuka pintu investasi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga terciptanya sebuah lingkungan serta iklim investasi yang baik guna tercapainya percepatan pembangunan provinsi tersebut (Jatmika, 2001). Pemerintah Provinsi Zhejiang juga memandang kerjasama ini sebagai suatu kerjasama yang mendatangkan banyak manfaat dan meyakini bahwa kerjasama ini akan memberikan hasil yang signifikan karena direncanakan dengan jangka waktu yang panjang. Berdasarkan kunjungan-kunjungan yang dilakukan, sampai akhirnya menjalin kerjasama, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Zhejiang memiliki banyak kesamaan mulai dari kesamaan mata pencaharian masyarakatnya, kondisi geografis berupa iklim, serta hal hal lainnya.

Dalam implementasi program kerjasama sama dalam bidang pembangunan infrastruktur lokal antara provinsi NTB dan Zhejiang dapat ditinjau melalui empat indikator implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dari sini bisa dilihat bahwa kerjasama yang dibentuk oleh kedua provinsi tersebut terlaksana, dikarenakan terlihat dari indikator-indikator tersebut, dengan tujuan sama-sama ingin memenuhi kepentingan wilayahnya masing-masing terlepas dari kepentingan negara.

METODOLOGI

Adapun metodologi yang digunakan untuk penulisan ini yaitu deskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai mengapa suatu instansi melakukan interaksi dengan instansi yang lainnya dan bagaimana implementasi pelaksanaan dalam interaksi tersebut (Sandu dkk, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk meneliti dan lebih mengarah ke analisa data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif (Bugin, 2006). Penelitian ini menyandarkan pada jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian melalui data sekunder atau data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal artikel online, data resmi instansi terkait, dan jurnal sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif ini agar mendapatkan gambaran dan pandangan-pandangan baru dalam menganalisis jalannya pelaksanaan kerjasama NTB dengan mitra internasionalnya yaitu Zhejiang Tiongkok dalam menjalankan ekonomi dan pembangunan.

Sementara ini, data analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan studi yang berbasis pada pencarian literatur baik itu melalui jurnal, buku, maupun sumber daring resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sampel penelitian yang digunakan melalui metode ini terdiri atas lebih dari satu hal yang memiliki rentan waktu yang berbeda dalam suatu objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia-Tiongkok Dalam Inisiasi Kerjasama Provinsi NTB dan Zhejiang

Paradiplomasi sendiri boleh dikatakan merupakan buah dari berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yang mana dari hal tersebut kemudian muncul kemungkinan bagi daerah untuk membentuk kerjasama tingkat internasional baik itu dengan sesama pemerintah daerah, perusahaan, maupun aktor non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Rumengan, 2009). Namun, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak asing, tentu ada saja hal yang harus dibicarakan melalui Kementerian Luar Negeri, yang selaku instansi penghubung antara Indonesia dengan negara lainnya (Mardialina & Munir, 2019).

Sehingga dalam menanggapi perkembangan dunia yang semakin rumit, dan upaya pemenuhan kebutuhan nasional di suatu negara maka oleh karena itu tindakan diplomasi dapat dikatakan sebagai merupakan suatu rancangan dan realisasi politik luar negeri di semua kalangan. Kekuatan nasional adalah hal yang penting untuk menentukan kekuatan negara. (Sibbawaihi, 2016). Kualitas diplomasi yang dimiliki oleh suatu negara kemudian menggabungkan faktor-faktor satu kesatuan yang terpadu sehingga memberikan arah dan kekuatan yang nyata. Maka dari itu diplomasi merupakan otak dari kekuatan nasional.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan kolega setingkat di luar negeri tidak dapat terlaksana jika tidak ada persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Maka harus adanya koordinasi dari instansi tersebut sebagai *stakeholder* untuk urusan luar negeri. Direktorat politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional memiliki tugas dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak kerjasama, perumusan, dan pelaksana kebijakan hingga dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional dalam bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional (Kementerian PPN). Bappenas yang diawasi oleh Direktorat Luar Negeri mengatur proses perencanaan daerah dalam membangun kerjasama lokal dengan mitra internasional. Otonomi daerah sendiri termaktub dan diatur oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana Undang Undang tersebut menjelaskan tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat daerah itu sendiri (UU RI, 2014).

Maka dari itu, Undang Undang di atas merupakan salah satu rujukan bagi setiap daerah yang ingin melaksanakan praktik paradiplomasi. Dimana dalam melaksanakan paradiplomasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tentu memerlukan adanya pengesahan kebijakan yang berlandaskan pada payung hukum yang berlaku. Karena dengan adanya kebijakan mengenai pelaksanaan paradiplomasi, maka pelaksanaan paradiplomasi dapat berjalan dengan cukup efektif dan tidak menimbulkan banyak kendala yang justru akan merugikan seluruh pihak yang terlibat. Maka dari itu dengan adanya kebijakan tersebut maka akan membuat *sister province* yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mitra internasionalnya yaitu Provinsi Zhejiang di Tiongkok menjadikan suatu bentuk pemahaman antara satu pihak dengan pihak yang lainnya mengingat semua kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak akan semakin baik untuk diimplementasikan.

Awal mula provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin kerjasama sister provinsi dengan Tiongkok yaitu Zainul Majdi selaku gubernur NTB yang pada saat itu menghadiri undangan dari RRT, dimana beliau ditunjuk untuk menjadi pimpinan delegasi Pemprov NTB pada kunjungan ke provinsi Zhejiang, Tiongkok, sebagai respon terhadap undangan yang diberikan oleh Konsulat Jenderal (Konjen) RRT di Denpasar, Bali, yang wilayah kerjanya merangkap provinsi NTB. Kunjungan tersebut, bertujuan untuk menjajaki peluang investasi dan kerjasama dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam pertemuan tersebut gubernur NTB dan anggota delegasi di sambut oleh wakil direktur dari *China People's Institute of Foreign Affairs* (CPIFA) Provinsi Zhejiang. Kemudian dalam kesempatan tersebut dibahas pula peninjauan kerjasama setingkat dengan para pejabat pemerintah provinsi Zhejiang,

termasuk tingkat kota Hangzhou yang berfokus pada skema kerjasama *sister province* kedua belah pihak. (Sibbawaihi, 2016)

Satu hal paling vital dalam kerjasama *sister province* adalah adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) yang mana hal ini dilakukan kesepakatan kerjasama dan tanda tangan MoU yang dilaksanakan di Tiongkok oleh Ridwansyah M. Yakub sebagai ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nusa Tenggara Barat atas nama Pemprov NTB dengan Yu Xi Hua selaku wakil pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok yang disaksikan oleh delegasi kedua belah pihak pada tanggal 14 Juni 2014 di Ningbo Marirriot Hotel Tiongkok. (Sibbawaihi, 2016)

Sehingga manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan *sister province* NTB dengan Zhejiang merupakan bentuk awal dari terbukanya hubungan internasional bagi pemerintah provinsi NTB hingga terciptanya mutualisme yaitu saling tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya. Oleh karena itu, luasnya wawasan sangat diperlukan untuk masyarakat provinsi NTB khususnya bagi pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Sehingga dari kerjasama ini dapat dirasakan manfaatnya dari kalangan sektor ekonomi, sektor budaya, sektor akademik dan sektor pertukaran informasi yang mana diharapkan untuk mampu memberi manfaat bagi masyarakat NTB. Provinsi Zhejiang, menyampaikan harapan melalui Konjen RRT di Denpasar sangat mengharapkan agar Pemprov NTB terus mempromosikan investasi, perdagangan dan budaya ke Tiongkok.

Program Kerja Sama Antara Provinsi NTB dan Zhejiang

Pada dasarnya kerjasama dengan jenis *Sister City* atau *Sister Province* akan terewajantahkan kedalam sebuah kebijakan daerah dan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan sasaran capaian serta target waktu yang telah di tentukan dengan pelaksanaan yang bersifat mengikat publik. Maka dari itu, implementasi dari jalinan kerja sama *Sister Province* yang sudah tertuang dalam bentuk kebijakan tersebut akan menghasilkan berbagai interaksi yang nantinya akan mendukung lahirnya sebuah luaran kerja yang jelas. Jika berbicara terkait dengan implementasi maka hal tersebut merupakan sebuah hal yang bersifat dinamis yang membutuhkan evaluasi setiap tahunnya agar kebijakan tersebut tetap terarah dan dipastikan terlaksana sesuai target dan sasaran yang telah ditentukan. Edward kemudian menerangkan bahwa terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Windiani, 2014). Kerjasama infrastruktur antara NTB dan Zhejiang telah menghasilkan sejumlah proyek penting yang berhasil meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Beberapa hasil kerjasama antara lain: pembangunan jalan Bima-Sumbawa, tol listrik Bima-Sape dan

perencanaan pembangunan jembatan sudah di masukan dalam kebijakan pembangunan NTB yang dimulai dari tahun 2018 hingga 2023.

Kerjasama *sister province* yang dilakukan oleh Pemprov NTB dengan koleganya di Zhejiang merupakan salah satu dari sekian banyak kerjasama *sister province* di Indonesia. Dalam realisasinya, *sister province* telah mengejewantahkan beberapa kegiatan tingkat provinsi yang dimulai dari pengembangan kualitas akademik, ekonomi, pertukaran informasi, hingga bidang kebudayaan. Mulai tahun 2015, kerjasama mulai memusat pada pengembangan dan pembangunan desa di NTB. Pemusatan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan dari Kementerian Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun perubahan kementerian tersebut sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk mempercepat arus pembangunan desa di seluruh Indonesia (Indraswari, 2015). Program oleh pemerintah pusat ini kemudian menjadi pembuka peluang untuk membentuk kerjasama dengan pihak di negara lain, sehingga pada akhirnya akan memberikan kesempatan bagi desa untuk dapat bekerjasama dengan pihak diluar batas geografis negaranya.

1. Kerjasama di Bidang Akademik

Program kerjasama di bidang Akademik merupakan sebuah program unggulan yang ditawarkan Provinsi Zhejiang ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini juga di sambut dengan sangat antusias oleh pihak Provinsi Nusa Tenggara barat mengingat latar belakang kapasitas pendidikan Indonesia Khususnya Nusa Tenggara Barat yang masih sangat rendah membuat program ini menjadi alternatif terbaik untuk mengembangkan kapasitas pelajar Indonesia agar mampu bersaing dan berkualitas di kancah Internasional. Mulai tahun 2019 tepatnya tanggal 25 Oktober Pemerintah Provnsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan komitmen kerjasamanya di bidang ini dengan mengadakan program kerjasama eksklusif dengan salah satu kampus tertua di Zhejiang yakni Universitas Gonshang Zhejiang (ZJSU) yang paling unggul dalam bidang bisnis, dengan merealisasikan program pengiriman seribu mahasiswa NTB. Adapun untuk visi akselerasi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, program ini dimaksud agar mahasiswa Nusa Tenggara Barat tidak hanya belajar bisnis terutama *e-commerce* untuk membangun industrialisasi daerah, akan tetapi juga dapat mendapatkan pemahaman bagaimana membangun sebuah daerah secara kompehernsif dengan mengkolaborasikan pembangunan fisik dan non-fisisk secara beriringan. Tidak hanya itu, di tahun selanjutnya melalui kerjasama ini, perwakilan *Indonesia Tionghoa Culture Center* (ITCC) membuka 120 program beasiswa yang di peruntuk bagi pelajar, pegawai serta

akan menyasar pondok pesantren yang ada di NTB agar mendapat kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri (Ntbprov, 2019).

2. Kerjasama di Bidang Ekonomi

Selain program kerjasama di bidang akademik untuk menunjang kualitas sumber daya manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat, bidang infrastruktur dan peluang investasi merupakan aspek yang dirasa penting untuk di kembangkan oleh keduanya. Program kerjasama ini bisa terwujud karena Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sebuah visi yang sama dalam melakukan kerjasama yakni akselerasi pembangunan daerah, dan hal tersebut tentunya harus di tunjang dengan infrastruktur daerah yang mumpuni. Selain sebagai bentuk percepatan pembangunan, pembangunan infrastruktur ini akan membuka peluang investasi Tiongkok ke Indonesia yang dimana akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat agar makin meningkat. Pada tahun 2019, NTB juga menjadi peserta seminar perdagangan dan investasi tingkat dunia di Tiongkok dan di sela-sela acara tersebut, NTB menawarkan lima proyek besar di daerah tersebut di antaranya yaitu peluang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Global Hub Kayangan, Samota, Kawasan Industri Sumbawa Barat dan kawasan Sape-Komodo – Sangiang (Sakosa) di Bima (Suarantb, 2019).

Melalui pertemuan tersebut, di tahun 2019 tepatnya pada tanggal 26 September 2019, Pemprov NTB berhasil menarik perhatian dari investor Tiongkok untuk berinvestasi pada proyek besar pembangunan jembatan gantung Lombok-Sumbawa sepanjang 16.5 Km dengan biaya konstruksi sebesar 16,5 triliun, dan total biaya sebesar 20 triliun. Pada tahun 2022 Pemprov Nusa Tenggara barat dengan perwakilan investor asal Tiongkok sudah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kereta Gantung. Proyek investasi ini di nilai sebagai salah satu proyek investasi paling besar yang di rncanakan setelah proyek Mandalika. Kereta Gantung ini juga nantinya akan memberikan kontribusi luar biasa pada peningkatan di sektor ekonomi dan pariwisata dengan estimasi pembangunan hingga tahun 2025. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan ini sangat penting untuk menunjang interaksi antar pulau serta jalur konektivitas bagi pekerja, pegawai dan pelajar serta sebagai salah satu titik vital jalur logistik nasional dari Aceh ke NTT, yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTB. Pada akhirnya Kerja sama ini merupakan implementasi dari konsep kerjasama yang dijalankan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kerja sama nya dengan Provinsi Zhejiang Tiongkok untuk mencapai kepentingan daerahnya yaitu berupa

peningkatan ekonomi Daerah yang akan menyokong pemulihan ekonomi Nasional (Antara, 2022).

3. Kerjasama di Bidang Pertukaran Informasi

Dalam membangun sebuah perubahan tentu dibutuhkan sebuah pemicu dan acuan untuk melakukan perubahan tersebut. Pada Oktober 2019, Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta beberapa jajarannya melakukan kunjungan ke Provinsi Zhejiang Tiongkok dengan latar belakang bahwa provinsi ini merupakan sebuah provinsi yang mampu bertransformasi menjadi provinsi dengan kota muda modern yang serba digital akan tetapi tetap ramah lingkungan dan lestari budayanya hanya dalam kurun waktu yang terbilang cepat yakni 10 tahun. Mulai tahun 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat telah merencanakan kunjungan ke Provinsi Zhejiang Tiongkok dan akhirnya terealisasi pada Oktober 2019 dengan beberapa staf jajarannya. Dengan fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menerapkan skema pembangunan daerah Zhejiang Untuk diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun aspek yang ingin diterapkan yakni pengawasan terhadap izin AMDAL, menjadikan objek sejarah dan seni budaya sebagai daya tarik pariwisata, pengadaan fasilitas umum yang ramah lingkungan dan pengembangan sektor industri. Komitmen ini dibuktikan dengan peneriman secara rutin staf pemerintahan Nusa Tenggara Barat ke Zhejiang Tiongkok untuk melakukan pertukaran informasi dari tahun 2018 hingga saat ini khususnya bidang Perencanaan tata wilayah dan kota agar dapat memahami secara holistik dari regulasi hingga pengenalan ke masyarakat terkait pembangunan daerah yang efektif (Bimakini, 2019).

Analisis Potensi Kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB dan Zhejiang Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Lokal

Kerjasama antara NTB dan Zhejiang memiliki potensi untuk terus meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu untuk membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar di wilayah NTB dan Zhejiang. Dan Dalam suatu kerjasama pasti ada saja hambatan yang dialami oleh kedua belah pihak antara pemerintah negara hingga dengan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini memiliki hambatan yang menjadi bentuk tidak optimalnya suatu realisasi kerjasama antar provinsi tersebut. Walaupun memang dengan adanya otonomi daerah tidak terbantahkan bahwa hal tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar terhadap pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur lokal yang berpegang teguh terhadap prinsip desentralisasi nasional dalam berbagai kewenangan sehingga pemerintah daerah dapat

membuat keputusan penting yang sesuai dengan kebutuhan suatu daerah masing-masing. Namun, seperti halnya kerjasama di bidang infrastruktur lainnya, kerjasama NTB-Zhejiang juga menemui beberapa kendala. Salah satu kendala terbesar yaitu terkait dengan masalah pendanaan dan pembiayaan. Sejumlah proyek infrastruktur yang diusulkan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan perlu adanya dukungan dari pihak swasta dan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Selain itu, masalah regulasi dan perizinan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Perbedaan regulasi dan perizinan antara Indonesia dan Tiongkok dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Namun, adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak NTB dan Zhejiang, semestinya tantangan yang ada dapat diatasi dan kerjasama infrastruktur dapat terus berkembang di masa depan. Maka adapun hambatan yang di hadapi dalam melakukan kerjasama Provinsi NTB dengan Zhejiang Tiongkok.

Hambatan faktor internal sendiri terdiri atas (a) Faktor Anggaran bahwasannya dana yang telah di rencanakan sering kali mengalami perubahan-perubahan yang di akibatkan oleh penetapan kebijakan secara buru-buru/mendadak yang kemudian mengakibatkan tidak cairnya dana tersebut. Kemudian (b) yaitu Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kemudian mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kurangnya SDM profesional menjadi alasan kuat sebagai salah satu penghambat di lingkup internal Pemprov NTB. Dan terakhir (c) yaitu krisis energi listrik, dimana kurangnya pasokan listrik yang terhadap masyarakat NTB yang seharusnya dapat di penuhi oleh pembangkit listrik negara sehingga hal tersebut menyebabkan investor asing terutama dari Tiongkok, kurang berminat untuk berinvestasi di bidang industri NTB.

Maka seharusnya kerjasama *sister province* antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Zhejiang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini tidak berjalan dengan baik atau dikatakan masih belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya tindakan lanjut dari pihak-pihak dinas terkait untuk tetap konsisten melaksanakan kerjasama ini yang sudah tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding). Hingga kerjasama pada sektor Infrastruktur sendiri merupakan kegiatan kedua provinsi masih belum dapat berjalan dengan maksimal walaupun banyaknya pengembangan infrastruktur yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik namun hingga saat ini hal tersebut belum adanya pembicaraan lebih lanjut tentang pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat direalisasikan lebih lanjut (Mardialina & Munir, 2019). Sangat disayangkan seharusnya provinsi NTB sendiri

dapat lebih berkembang lagi karena memiliki lahan yang banyak atau sektor investasi pada bidang infrastruktur pembangunan lokal.

KESIMPULAN

Jalinan kerjasama *sister province* antara NTB dengan Zhejiang pada berbagai sektor seperti ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi dapat terlaksana dengan baik. Sehingga tentunya memberikan dampak positif bagi kemajuan NTB di masa depan. Diharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun ada saja hambatan-hambatan dari faktor internal baik dari birokrasi pemerintah hingga dengan SDM yang belum siap sehingga mengakibatkan sedikit menjadi hambatan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjasama pemerintah. Akan tetapi bukan menjadi masalah yang serius untuk menghambat terlaksananya program pemerintah yang telah di rencanakan. Di harapkan kepada provinsi NTB dan provinsi Zhejiang untuk tetap saling mendukung dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing dan mencapai tujuannya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander S Kuznetsov. 2014. Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs. In Routledge New Diplomacy Studies. Routledge.
- Burhan Bugin. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Crikemans, David. 2008. 'Are the Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?'. University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy. Belgium.
- Duchacek, Ivo D. 1987. "Constitution Dan Constitutionalism" dalam Bogdanor, Vernon. Blackwell's Encyclopedia of Political Science. Blackwell: Oxford.
- Jatmika, Sidik. 2001. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Sandu, Siyoto, dan M. Ali Sodik. 2001. Dasar Metodologi Penelitian. Cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Jurnal

- Aldecoa, F., & Keating, M. (Eds.). (1999). *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. Routledge.
- Andriyany, D. P. (2021). *Analisis Konsep Produktivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur)* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara). Hal. 22
- Bell, D. (1989). The Third Technological Revolution and Its Possible Socioeconomic Consequences. *Dissent*.
<https://www.dissentmagazine.org/article/the-third-technological-revolution-and-its-possible-socioeconomic-consequences>
- Indraswari, F. V. (2015). Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Desa Melalui Sistem Saemaul Undong (Studi Kasus Kerjasama Lintas Batas Daerah Istimewa Yogyakarta-Gyeongsangbuk-Do). *Jurnal Transformasi Global*, 2(2), 42–61. Retrieved
- Lecours, A. (2002). *Paradiplomacy: Reflections on the Foreign Policy and International Relations of Regions*. *International Negotiation*, 7(1), 91-114.
- Mardialina, Mala., & Munir, A. Mubarak. (2019). Penguatan Peran Dan Strategi Calon Aparatur Pemerintah Daerah NTB Melalui Analisis Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Reformasi Bagi Pengembangan Pembangunan Daerah. *LPPM Universitas Mataram*, 1(1), 188–189.
- Michelmann, H. J., & Soldatos, P. (1988). Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units. In D. Latouche, G. Stevenson, & I. D. Duchacek (Eds.),

Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments (pp. 24–25). Greenwood Press.

Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 86–93.

Sibawaihi, Assazali., Proses Pengambilan Keputusan Pemprov NTB Membangun Kerjasama Sister Province Dengan Pemprov Zhejiang RRT 2014-2015, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016.

Windiani, R. (2014). Implementasi Sister Province Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia di Bidang Pertanian. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 20–36. <https://doi.org/10.14710/jis.13.2.2014.20-36>

Website

About Sister Cities International. (n.d.). Sister Cities International. Retrieved November 29, 2021, from <https://sistercities.org/about-us/>

AntaraneWS. 2019. Pemprov memulai pembangunan kereta gantung ke Gunung Rinjani NTB. Diakses pada 07 Juni 2023, dari <https://www.antaraneWS.com/berita/3311050/pemprov-memulai-pembangunan-kereta-gantung-ke-gunung-rinjani-ntb>

Bimakini.com. 2019. Gubernur NTB: Qianjiang New City Jadi Rujukan Konsep Perencanaan Pembangunan Kota. Diakses pada 07 Juni 2023, dari <https://www.bimakini.com/2019/10/gubernur-ntb-qianjiang-new-city-jadi-rujukan-konsep-perencanaan-pembangunan-kota/>

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional. <https://www.bappenas.go.id/unit-kerja/0204>

Gubernur ingin akselerasi pembangunan Zhejiang di aplikasikan di NTB. <https://www.antaraneWS.com/berita/1130332/gubernur-ingin-akselerasi-pembangunan-zhejiang-di-aplikasikan-di-ntb>

Ntbprov. 2018. NTB dan China Perkuat Kerjasama Bidang Pendidikan. Diakses pada 07 Juni 2023 dari <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/ntb-dan-china-perkuat-kerjasama-bidang-pendidikan195.html>

Ntbprov. 2019. Zhejiang Gongshang University, Tujuan Pendidikan Bisnis Program Beasiswa Ntb Di Tiongkok. Diakses pada 07 Juni 2023, dari <https://ppid.biroadpim.ntbprov.go.id/zhejiang-gongshang-university-tujuan-pendidikan-bisnis-program-beasiswa-ntb-di-tiongkok/>

Ntbprov. 2022. Terima Kunjungan Konjen RRT, Gubernur NTB Kembali Perkuat Kerjasama. Diakses pada 07 Juni 2023, dari <https://www.ntbprov.go.id/post/terima-kunjungan-konjen-rrt-gubernur-ntb-kembali-perkuat-kerjasama>

Nurmazinda, Riri., Kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang

(RRT) Dalam Membangun Perekonomian Daerah (2014-2018), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2023. <https://www.scribd.com/presentation/627163257/Sister-Province-ntb-dengan-Zhejiang#>

Paradiplomacy: Why Is It Good For Democracy? (2017, October 31). Coppieters Foundation. <https://ideasforeurope.eu/news/paradiplomacy-why-is-it-good-for-democracy/>

Profil Daerah. (n.d.). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved November 27, 2021, from <https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah>

Suarantb. 2019. Lima Proyek Besar Di NTB Ditawarkan Ke Investor. Diakses pada 07 Juni 2023, dari <https://www.suarantb.com/2019/09/27/lima-proyek-besar-di-ntb-ditawarkan-ke-investor/>

Toledo, Spain. (n.d.). Toledo Sister Cities International. Retrieved November 29, 2021, from <http://www.toledosistercities.org/sistercities/toledo-spain/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 3 (2014). <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu23-2014bt.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional <file:///C:/Users/REYDO/Downloads/UU%20No.24%20Tahun%202000%20ttg%20Perjanjian%20Internasional.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/UU-227-262-UU_No._32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf

What is a Sister City? (n.d.). Sister Cities International. Retrieved November 28, 2021, from <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>